

III. KERANGKA TEORISTIS

3.1 Kerangka Pemikiran

Pertambahan penduduk yang pesat akan menyebabkan terjadinya peningkatan kebutuhan masyarakat dan juga lapangan pekerjaan karena sumber pendapatan semakin berkurang. Kenyataan ini dapat menimbulkan terjadinya pengurusan terhadap sumber daya hutan ataupun alih fungsi lahan hutan menjadi lahan pertanian yang pada akhirnya akan menurunkan jumlah dan kualitasnya. Penelitian mengenai PHBM ini berangkat dari pemahaman bahwa kerusakan hutan seringkali disebabkan oleh tekanan masyarakat sekitar hutan yang merambah hutan-hutan negara karena minimnya sumberdaya yang dapat mereka manfaatkan sebagai sumber penghidupannya. Di sisi lain, pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan yang penting diterapkan dalam pengelolaan sumberdaya alam termasuk diantaranya sumberdaya hutan. Hal tersebut semakin disadari terutama sejak era otonomi daerah yang mengamanatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan.

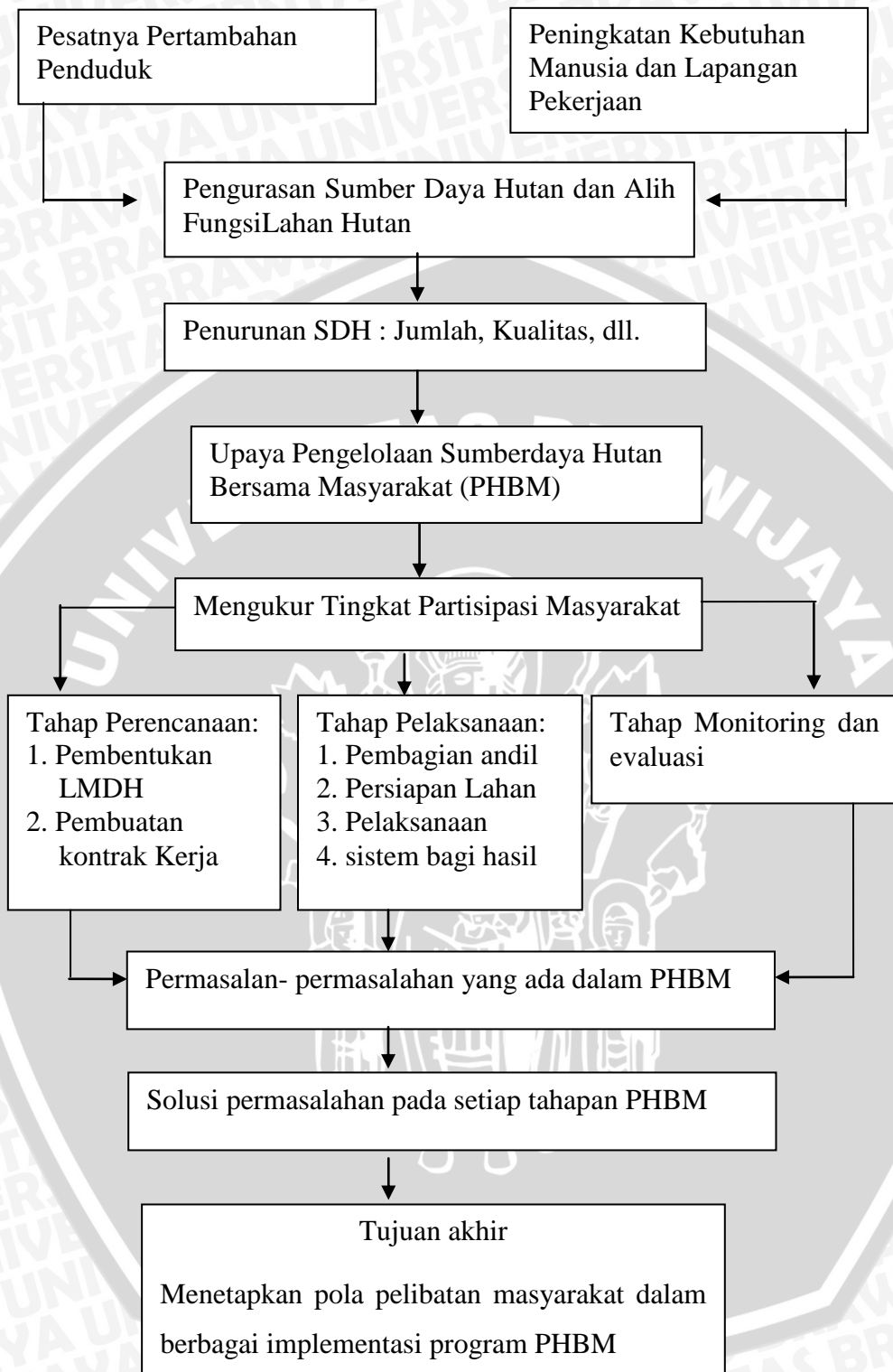
Menyadari pentingnya pemberdayaan masyarakat, Perum Perhutani sebagai pengelola hutan negara di Pulau Jawa mengeluarkan SK No. 136/Kpts/Dir/2001. Keputusan tersebut berisi tentang mekanisme kerja sama dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Melalui program PHBM, Perum Perhutani mengharapkan berkurangnya gangguan terhadap keamanan hutan serta dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Kedua hal tersebut diharapkan akan menunjang sistem pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Pada sisi masyarakat, PHBM merupakan akses legal bagi masyarakat sekitar hutan untuk dapat memanfaatkan hutan dan hasil-hasilnya sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Akses terhadap hutan memungkinkan masyarakat untuk mengelola lahan usahatani tumpangsari khususnya bagi masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki lahan usahatani sendiri. Pemanfaatan hasil-hasil hutan dirasakan masyarakat dengan adanya hak penjarangan serta bagi hasil kayu pada masa panen produktif. Hal-hal tersebut akan membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya karena adanya peningkatan curahan kerja dalam

usahatani serta pengelolaan hutan yang akhirnya akan membantu mereka pula untuk meningkatkan pendapatan rumah tangganya. Cakupan dalam penelitian ini diawali dengan mengkaji berbagai permasalahan yang timbul dalam implementasi PHBM. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Perhutani untuk mengantisipasi hal tersebut adalah dengan melaksanakan kegiatan PHBM. Permasalahan yang dapat diangkat dari keberadaan sistem PHBM ini antara lain adalah partisipasi petani, peranan KTH terhadap partisipasi petani dan kontribusi pendapatan dari program PHBM terhadap perilaku petani. Berbagai masalah tersebut dapat terjawab dengan adanya berbagai data seperti data dari responden peserta KTH serta data-data penunjang lainnya.

Untuk menilai tingkat kolaborasi yang sedang berlangsung ad beberapa faktor yang dapat dijadikan sebagai indikator. Faktor-faktor tersebut diantaranya faktor tujuan bersama, faktor percaya, faktor pembagian peran dan tanggung jawab, faktor kapasitas masing-masing, faktor dari PHBM, faktor pentingnya resiko. Hal ini berfungsi untuk melihat tingkat partisipasi masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pra-pelaksanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi dan monitoring. Apabila masyarakat, KTH, dan LMDH aktif melakukan tahap-tahap partisipasi tersebut, niscaya PHBM akan berjalan dengan baik dan optimal.





Gambar 1: Kerangka Pemikiran Pelibatan Masyarakat Pada Pelembagaan Budaya Konservasi Dalam Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).

3.2 Batasan Penelitian

Penelitian ini membatasi pembahasannya pada kasus yang terjadi di Desa Pait dan tidak mengambil kesimpulan umum mengenai kegiatan program PHBM di seluruh wilayah Indonesia yang menjadi tanggung jawab Perum Perhutani. Responden utama dalam penelitian ini adalah para petani sekitar hutan yang melakukan penggarapan pada lahan kayu milik perhutani. Penelitian tidak melakukan analisis usahatani mendalam untuk mengetahui kelayakan usahatani yang dilakukan oleh para penggarap ataupun kelayakan kegiatan pengelolaan kayu dalam kerangka program PHBM. Analisis terhadap Pola pelibatan masyarakat pada tiap tahap implementasi PHBM untuk pencapaian tujuan konservasi, pemulihan fungsi hutan, dan aspirasi masyarakat terhadap PHBM.

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.2.1 Kolaborasi antara Perum Perhutani dengan LMDH dan KTH

1. Tujuan bersama adalah apakah tujuan yang akan dicapai dengan adanya kolaborasi antara Perum Perhutani dan petani hutan dengan tiga indikator penilaian yaitu tujuan khusus, contoh yang konkret, tercapainya tujuan dan objektif serta berbagi pandangan.
2. Saling percaya (*trust*) adalah bagaimana kepercayaan Perum Perhutani dan petani hutan dalam membangun kolaborasi dengan indikator penilaian diantaranya pihak-pihak yang berkolaborasi telah disetujui oleh tokoh setempat, iklim sosial dan politik yang menguntungkan, rasa saling percaya, menghormati dan tanggung jawab serta frekuensi komunikasi dan keterbukaan.
3. Pembagian peran dan tanggung jawab adalah bagaimana peran dan tanggung jawab diantara dua belah pihak selama ini dalam membangun kolaborasi dengan indikator penilaian yaitu kemampuan berkompromi, bentuk partisipasi seluruh pihak, fleksibilitas, mengembangkan peran/tugas dan pedoman kebijakan secara jelas, pelaksanaan program dengan langkahlangkah yang tepat serta anggota LMDH merupakan pihak yang tepat untuk mewakili masyarakat.
4. Kapasitas masing-masing pihak adalah bagaimana kemampuan kedua belah pihak dalam masalah manajemen PHBM dan ketersediaan SDM dengan indikator penilaian yaitu anggota turut berpartisipasi dalam pelaksanaan dan

penentuan hasil akhir, menjalin komunikasi dan hubungan informal serta kemampuan pemimpin.

5. Hasil PHBM adalah bagaimana menurut pandangan kedua belah pihak dari hasil yang diperoleh dari program PHBM dengan indikator penilaian yaitu sejarah mengenai proses kolaborasi di tengah masyarakat dan anggota merasa proses kolaborasi sebagai kebutuhan.
6. Resiko adalah bagaimana penyelenggaraan permodalan dalam pelaksanaan program PHBM dengan indikator penilaian yaitu penyesuaian (*Adaptability*) serta tercukupinya dana, pekerja, peralatan dan waktu.

3.2.2 Partisipasi Lembaga Masyarakat Desa Hutan dalam Program PHBM

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan program PHBM adalah keikutsertaan masyarakat yang termasuk dalam kelompok tani hutan yang meliputi:

1. Perencanaan PHBM, adalah proses pengambilan keputusan yang rasional dalam kegiatan PHBM dan dikategorikan tidak pernah terlibat, jarang terlibat dan sering terlibat.
2. Pelaksanaan PHBM, adalah kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan PHBM yang telah direncanakan dan dikategorikan tidak pernah terlibat, jarang terlibat dan sering terlibat.
3. Monitoring dan evaluasi PHBM, adalah kegiatan yang mengarah pada evaluasi hasil dari program PHBM dan dikategorikan tidak pernah terlibat, jarang terlibat dan sering terlibat.

3.2.3 Tipologi Partisipasi Masyarakat

1. Partisipasi pasif atau manipulative adalah masyarakat anggota PHBM belum terlibat sama sekali pada kegiatan-kegiatan dalam PHBM.
2. Partisipasi informative adalah masyarakat belum terlibat dalam PHBM, namun mereka hanya sekedar diberitahu oleh petugas apa yang akan dilakukan dalam program PHBM.
3. Partisipasi konsultatif adalah masyarakat sudah ada pertanyaan-pertanyaan kepada petugas dalam program PHBM, namun individu belum mempunyai adil dalam pembuatan keputusan.

4. Partisipasi Insentif adalah adanya inovasi-inovasi untuk perbaikan program PHBM dan masyarakat mendapat keuntungan atau jasa dari perbaikan inovasi tersebut.
5. Partisipasi fungsional adalah masing-masing anggota sudah melakukan hak dan kewajiban sesuai apa yang ada dalam program PHBM
6. Partisipasi interaktif adalah masing-masing anggota PHBM sudah melakukan seluruh tahapan-tahapan dan kegiatan yang ada, serta terjadi dialog untuk menetapkan sebuah keputusan.
7. Partisipasi mandiri adalah masing-masing anggota memiliki inisiatif sendiri untuk berpartisipasi dalam seluruh kegiatan untuk memajukan program PHBM yang ada.

3.3.4 Pengukuran variabel

Variabel- variabel yang diukur dilakukan dengan menggunakan kusioner. Jawaban dan skor dihimpun dalam tabel, untuk kemudian dilakukan analisa. Adapun variabel- variabel yang diukur adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi tahap perencanaan

partisipasi adalah sebagai derajat keikutsertaan dari stakeholder lokal dalam proses pengambilan keputusan di dalam seluruh tahapan proyek. Keterlibatan masyarakat bisa dalam bentuk kontribusi tenaga kerja, uang atau keduanya untuk tujuan bersama dan keikutsertaan dalam pertemuan yang membicarakan berbagai hal untuk keperluan bersama. Partisipasi atau keikutsertaan petani peserta PHBM dalam kegiatan perencanaan PHBM, yang dilihat dari aspek keterlibatan mereka di dalam kontrak kerja penentuan jenis tanaman. Semua jumlah keikutsertaan berdasarkan jumlah keterlibatan atau keikutsertaan petani PHBM dalam setiap tahapan pada tahap perencanaan kegiatan dapat dilihat pada tabel 1.

Pengukuran variabel tahap pembentukan LMDH:

- a. Pemberian undangan
- b. Persentase kehadiran
- c. Penentuan jumlah anggota
- d. Penetapan jumlah anggota
- e. Penentuan kordinator LMDH

f. Pemilihan kordinator LMDH

Tabel 1: Tahap Pembentukan LMDH

Intensitas keikutsertaan	jumlah responden	Responden terlibat	Responden tidak terlibat
Pemberian undangan	41		
Persentase kehadiran	41		
Penentuan jumlah anggota	41		
Penetapan jumlah anggota	41		
Penentuan kordinator LMDH	41		
Pemilihan kordinator LMDH	41		

Tingkat keterlibatan yang dapat diraih responden dalam tahap pelaksanaan bisa bervariasi bernilai satu sampai enam sesuai dengan jumlah kegiatan pada setiap tahapan. Dari kegiatan di atas bisa dilihat berapa kali tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan di dalam setiap tahapan-tahapan dalam program PHBM. Sedangkan tipologi partisipasi pada tahap perencanaan dapat dikategorikan seperti pada tabel 2. Tipologi ini merupakan hasil dari pendapat masing-masing anggota kenapa mereka mengikuti dan tidak mengikuti kegiatan yang ada dalam setiap tahapan yang ada dalam PHBM.

Tabel 2: Tipologi Partisipasi Masyarakat Pada Tahap Pembentukan LMDH

Tingkat Partisipasi	%
Partisipasi pasif atau manipulatif	
Partisipasi informatif	
Partisipasi konsultatif	
Partisipasi insentif	
Partisipasi fungsional	
Partisipasi interaktif	
Mandiri	

Penentuan variabel tahap kontrak kerja penentuan jenis tanaman:

- a. pembuatan kontrak kerja
- b. kontrak kerja dipelajari
- c. kontrak kerja disosialisasikan
- d. kontrak kerja ditandatangani
- e. kontrak kerja di implementasi
- f. kontrak kerja di evaluasi



Tabel 3: Tahap Kontrak Kerja Penentuan Jenis Tanaman

Intensitas keikutsertaan	Jumlah responden	Responden terlibat	Responden tidak terlibat
pembuatan kontrak kerja	41		
kontrak kerja dipelajari	41		
kontrak kerja disosialisasikan	41		
kontrak kerja ditandatangani	41		
kontrak kerja di implementasi	41		
kontrak kerja di evaluas	41		

Tingkat keterlibatan yang dapat diraih responden dalam tahap pelaksanaan bisa bervariasi bernilai satu sampai enam sesuai dengan jumlah kegiatan pada setiap tahapan. Dari kegiatan di atas bisa dilihat berapa kali tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan di dalam setiap tahapan-tahapan dalam program PHBM. Sedangkan tipologi partisipasi pada tahap perencanaan dapat dikategorikan seperti pada tabel 4. Tipologi ini merupakan hasil dari pendapat masing-masing anggota kenapa mereka mengikuti dan tidak mengikuti kegiatan yang ada dalam setiap tahapan yang ada dalam PHBM.

Tabel 4: Tipologi Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Tahap Kontak Kerja Penentuan Jenis Tanaman

Tingkat Partisipasi	%
Partisipasi pasif atau manipulatif	
Partisipasi informatif	
Partisipasi konsultatif	
Partisipasi insentif	
Partisipasi fungsional	
Partisipasi interaktif	
Mandiri	

2. Partisipasi tahap pelaksanaan

peran penting partisipasi dalam pengelolaan hutan yang lestari sangat terkait dengan sistem budaya untuk kesejahteraan masyarakat dikombinasikan dengan keberagaman sistem tersebut antar ruang dan waktu. Tanpa partisipasi aktif dari para aktor dalam pengelolaan hutan, tidak akan ada mekanisme yang sesuai untuk mengkomunikasikan aspek-aspek budaya yang relevan terhadap pemangku kepentingan lainnya. Partisipasi tahap pelaksanaan PHBM dapat dilihat dari intensitas keikutsertaan peserta dalam kegiatan: pembagian andil dan

pemasangan patok batas, tahap persiapan lahan, tahap pelaksanaan dan tahap sistem bagi hasil.

Penentuan variabel andil dan pemasangan patok batas:

- a. penentuan lokasi andil
- b. penentuan luas andil
- c. pengukuran andil
- d. pengundian andil
- e. penentuan tempat patok
- f. jenis patok yang digunakan
- g. pemasangan patok

Tabel 5: Tahap Pembagian Andil dan Pemasangan Patok Batas

Intensitas keikutsertaan	Jumlah responden	Jumlah terlibat	Jumlah tidak terlibat
penentuan lokasi andil	41		
penentuan luas andil	41		
pengukuran andil	41		
pengundian andil	41		
penentuan tempat patok	41		
jenis patok yang digunakan	41		
pemasangan patok	41		

Tingkat keterlibatan yang dapat diraih responden dalam tahap pelaksanaan bisa bervariasi bernilai satu sampai tujuh sesuai dengan jumlah kegiatan pada setiap tahapan. Dari kegiatan di atas bisa dilihat berapa kali tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan di dalam setiap tahapan-tahapan dalam program PHBM. Sedangkan tipologi partisipasi pada tahap perencanaan dapat dikategorikan seperti pada tabel 6. Tipologi ini merupakan hasil dari pendapat masing-masing anggota kenapa mereka mengikuti dan tidak mengikuti kegiatan yang ada dalam setiap tahapan yang ada dalam PHBM.

Tabel 6: Kategori Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Tahap Pembagian Andil dan Pemasangan Patok

Tingkat Partisipasi	%
Partisipasi pasif atau manipulatif	
Partisipasi informatif	
Partisipasi konsultatif	
Partisipasi insentif	
Partisipasi fungsional	
Partisipasi interaktif	
Mandiri	

Tahap persiapan lahan:

- a. pembuatan jalan pemeriksaan
- b. pembuatan gubuk kerja
- c. pembuatan teras gundulan
- d. pembuatan jarak tanam
- e. pemasangan anjir
- f. pembuatan lobang tanam
- g. pembuatan plang

Tabel 7: Tahap Persiapan Lahan

Intensitas keikutsertaan	Jumlah responden	Jumlah terlibat	Jumlah tidak terlibat
pembuatan jalan pemeriksaan	41		
pembuatan gubuk kerja	41		
pembuatan teras gundulan	41		
pembuatan jarak tanam	41		
pemasangan anjir	41		
pembuatan lobang tanam	41		
pembuatan plang	41		

Tingkat keterlibatan yang dapat diraih responden dalam tahap pelaksanaan bisa bervariasi bernilai satu sampai tujuh sesuai dengan jumlah kegiatan pada setiap tahapan. Dari kegiatan di atas bisa dilihat berapa kali tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan di dalam setiap tahapan-tahapan dalam program PHBM. Sedangkan tipologi partisipasi pada tahap perencanaan dapat dikategorikan seperti pada tabel 8. Tipologi ini merupakan hasil dari pendapat

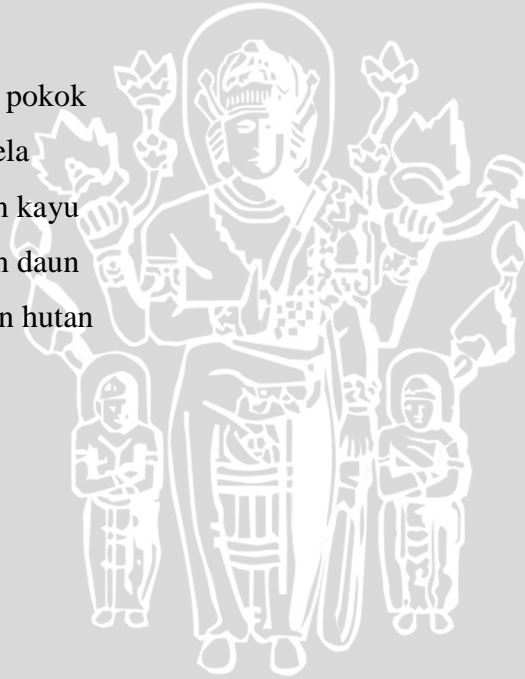
masing-masing anggota kenapa mereka mengikuti dan tidak mengikuti kegiatan yang ada dalam setiap tahapan yang ada dalam PHBM.

Tabel 8: Kategori Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Tahap Persiapan Lahan

Tingkat Partisipasi	%
Partisipasi pasif atau manipulatif	
Partisipasi informatif	
Partisipasi konsultatif	
Partisipasi insentif	
Partisipasi fungsional	
Partisipasi interaktif	
Mandiri	

Tahap pelaksanaan:

- menanam sesuai jarak tanam
- menyulam
- mendangir tanaman pokok
- merawat tanaman sela
- mencegah pencurian kayu
- mencegah pencurian daun
- mencegah kebakaran hutan



Tabel 9: Tahap Pelaksanaan

Intensitas keikutsertaan	Jumlah responden	Jumlah terlibat	Jumlah tidak terlibat
menanam sesuai jarak tanam	41		
Menyulam	41		
mendangir tanaman pokok	41		
merawat tanaman sela	41		
mencegah pencurian kayu	41		
mencegah pencurian daun	41		
mencegah kebakaran hutan	41		

Tingkat keterlibatan yang dapat diraih responden dalam tahap pelaksanaan bisa bervariasi bernilai satu sampai enam sesuai dengan jumlah kegiatan pada setiap tahapan. Dari kegiatan di atas bisa dilihat berapa kali tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan di dalam setiap tahapan-tahapan dalam program PHBM. Sedangkan tipologi partisipasi pada tahap perencanaan dapat dikategorikan seperti pada tabel 10. Tipologi ini merupakan hasil dari pendapat masing-masing anggota kenapa mereka mengikuti dan tidak mengikuti kegiatan yang ada dalam setiap tahapan yang ada dalam PHBM.

Tabel 10: Kategori Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Tahap Pelaksanaan

Tingkat Partisipasi	%
Partisipasi pasif atau manipulatif	
Partisipasi informatif	
Partisipasi konsultatif	
Partisipasi insentif	
Partisipasi fungsional	
Partisipasi interaktif	
Mandiri	

Pengukuran variabel tahap sistem bagi hasil:

- Penentuan tanggal survei lokasi dengan pihak terkait
- Melakukan survei lokasi
- Pengukuran volume hasil panen
- Proses negosiasi bagi hasil
- Penetapan sistem bagi hasil
- Pemberian bagi hasil

g. Evaluasi sistem bagi hasil

Tabel 11: Tahap Sistem Bagi Hasil

Intensitas keikutsertaan	Jumlah responden	Jumlah terlibat	Jumlah tidak terlibat
Penentuan tanggal survei lokasi dengan pihak terkait	41		
Melakukan survei lokasi	41		
Pengukuran volume hasil panen	41		
Proses negosiasi bagi hasil	41		
Penetapan sistem bagi hasil	41		
Pemberian bagi hasil	41		
Evaluasi sistem bagi hasil	41		

Tingkat keterlibatan yang dapat diraih responden dalam tahap pelaksanaan bisa bervariasi bernilai satu sampai enam sesuai dengan jumlah kegiatan pada setiap tahapan. Dari kegiatan di atas bisa dilihat berapa kali tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan di dalam setiap tahapan-tahapan dalam program PHBM. Sedangkan tipologi partisipasi pada tahap perencanaan dapat dikategorikan seperti pada tabel 12. Tipologi ini merupakan hasil dari pendapat masing-masing anggota kenapa mereka mengikuti dan tidak mengikuti kegiatan yang ada dalam setiap tahapan yang ada dalam PHBM.

Tabel 12: Kategori Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Tahap Sistem Bagi Hasil

Tingkat Partisipasi	%
Partisipasi pasif atau manipulatif	
Partisipasi informatif	
Partisipasi konsultatif	
Partisipasi insentif	
Partisipasi fungsional	
Partisipasi interaktif	
Mandiri	

3. Evaluasi Partisipasi dalam PHBM

Tingkat partisipasi masyarakat dapat dilihat melalui keikutsertaan mereka baik pada tahap perencanaan maupun tahap pelaksanaan PHBM. Oleh sebab itu indeks skor partisipasi dalam PHBM merupakan akumulasi indeks skor tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan. Besarnya tingkat partisipasi masyarakat dalam PHBM yaitu bekisar antara 0-42. Kategori tingkat partisipasi masyarakat dalam PHBM dapat dilihat pada tabel 15.

Tabel 13. Kategori Evaluasi tingkat partisipasi masyarakat dalam PHBM

Tingkat Partisipasi	%
Partisipasi pasif atau manipulatif	
Partisipasi informatif	
Partisipasi konsultatif	
Partisipasi insentif	
Partisipasi fungsional	
Partisipasi interaktif	
Mandiri	

4. Keterlibatan pihak LMDH dan KTH dalam program PHBM

Keterlibatan pihak Kelompok Tani Hutan dapat dilihat dari peranan LMDH dalam memberikan

- Metode penyuluhan
- Keikutsertaan ketua kelompok dalam pemilihan jenis tanaman
- Keikutsertaan dalam memberi materi, dorongan, dan motivasi dengan kebutuhan petani
- Intensitas kehadiran ketua kelompok. Pemberian skor dalam metode penyuluhan yang diberikan oleh pihak LMDH pada masyarakat dengan dilihat pada tabel 14.

Tabel 14: Tahap Sistem Bagi Hasil

Intensitas keikutsertaan	Jumlah responden	Responden terlibat	Responden tidak terlibat
Terlibat 4 kegiatan	41		
Terlibat 3 kegiatan	41		
Terlibat 2 kegiatan	41		
Terlibat 1 kegiatan	41		

Tingkat keterlibatan yang dapat diraih responden dalam tahap pelaksanaan yaitu satu sampai empat kegiatan, tingkat partisipasi pada tahap perencanaan dapat dikategorikan seperti pada tabel 15.

Tabel 15: Tipologi Tingkat Partisipasi LMDH dan KTH

Tingkat Partisipasi	%
Partisipasi pasif atau manipulatif	
Partisipasi informatif	
Partisipasi konsultatif	
Partisipasi insentif	
Partisipasi fungsional	
Partisipasi interaktif	
Mandiri	

